

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***1.1*** Latar Belakang

Pemerintah itu harus bersikap adil dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa ada perbedaan kelas antara kaum proletar dan kaum borjuasi. Karena untuk melahirkan seorang pemimpin, negara harus menggelontorkan anggaran yang cukup banyak, oleh sebab itu kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dengan harapan bahwa setelah proses pemilihan selesai dan terpilihnya kepala daerah yang mengemban amanah baru diharapkan mampu berorientasi pada kebutuhan publik.

Pemerintah juga harus bisa memberikan akses dan fasilitas yang memang menjadi kebutuhan fundamental masyarakatnya, supaya kehadiran pemerintah tersebut benar-benar diakui keberadaanya oleh publik, tentunya harus dibarengi dengan visi, ide, gagasan yang membangun dan dibuktikan dengan kerja nyata yang mempunyai asas kebermanfaatan bagi masyarakat banyak. Maka itu diharapkan setiap Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung setiap 5 tahun sekali mampu membuahkan hasil yang progresif terhadap kemajuan sebuah daerah, baik itu dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 15 Februari 2017 di seluruh wilayah di provinsi Aceh dan tidak ketinggalan Kabupaten Aceh Timur juga ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Kemudian dalam kontestasi politik Pilkada di Aceh Timur muncul dua pasangan calon (PASLON). Paslon nomor urut

satu Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M dan Abdul Rani maju sebagai calon Bupati melalui jalur independen dengan total dukungannya mencapai 23.123 fotokopi KTP, sedangkan yang dibutuhkan hanya 12.575 fotokopi KTP dan sebarannya terdapat di 24 Kecamatan. Sedangkan Paslon nomor urut dua H. Hasballah Bin H.M. Thaib dan Syahrul Bin Syamaun yang merupakan petahana maju sebagai calon Bupati dari partai yang diusung oleh Partai Aceh yang memiliki 23 kursi di DPRK.

Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Aceh Timur terpilih periode 2017-2022 pasca keputusan Mahkamah Konstitusi MK0 digelar dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Timur, Iskandar A Gani di Gedung serbaguna Idi Rayeuk pada Kamis 6 April 2017. Kemudian Muli Karim selaku komisioner KIP Aceh Timur membacakan surat nomor: 20/kpts/KIP.Atim-001.433486/IV/2017 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur 2017.

Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Timur tahun 2017.

NO	NAMA	SUARA
1.	Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M dan Abdul Rani	88.663 <b>(48,74%)</b> .
2.	H. Hasballah Bin H.M. Thaib dan Syahrul Bin Syamaun	93.230 <b>(52,26%)</b>

Perolehan suara di Kecamatan Peunaron pada Pilkada Aceh Timur pada tahun 2017.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>SUARA</b>
1.	Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M dan Abdul Rani	2.682 <b>(61,6%)</b>
2.	H. Hasballah Bin H.M. Thaib dan Syahrul Bin Syamaun	1.679 <b>(38,4%)</b>

*Sumber: ([https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/aceh\\_timur](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/aceh_timur))*

Hasil kompilasi perolehan suara Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Aceh timur telak dimenangkan oleh Rocky, akan tetapi perolehan suara di Kecamatan Peunaron Rocky mengalami kekalahan dari Nektu. Tentunya disini tidak diinginkannya sebuah perbedaan dari kepala daerah, karena setiap masyarakat menginginkan perlakuan yang sama, baik itu dalam membuat kebijakan, pembangunan dan lain sebagainya.

Setelah Pilkada selesai dan terlaksana sesuai prosedur yang berlaku, kembali kepada tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian sekiranya tujuan negara tersebut juga mampu direalisasikan di Kecamatan Peunaron karena Peunaron juga termasuk kedalam wilayah yang diakui oleh Indonesia. Yang menjadi tanda tanya apakah Bupati Aceh Timur terpilih tersebut mampu mewujudkan cita-cita negara karena secara kelembagaan Bupati merupakan Kepala Daerah yang bertugas untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang sudah menjadi otoritas nya, termasuk Kecamatan Peunaron.

IDM (Indeks Desa Membangun) di Kecamatan Peunaron berada di 0,5676 artinya bahwa dapat di terangkan daerah Kecamatan Peunaron masih tergolong daerah yang sangat tertinggal dan Indeks Desa Membangun ini mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa *Sumber* ([www.idm.kemendes.go.id](http://www.idm.kemendes.go.id)).

Apabila sudah memasuki musim kemarau masyarakat dipaksa untuk mencari air bersih ke sungai terdekat dan harus menempuh perjalanan sekitar 7 km, cara menuju ke sungai tersebut beragam ada yang menggunakan sepeda motor dan ada juga masyarakat yang harus berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih. Ditambah lagi dengan jalan yang berlumpur kondisi ini semakin menambah kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

Kemudian tidak kalah pentingnya dari air bersih, masyarakat Peunaron juga membutuhkan irigasi persawahan yang sampai hari ini juga belum merata, akibatnya hasil panen para petani berkurang, yang seharusnya satu tahun bisa tiga kali panen, karena irigasi yang tidak ada maka masyarakat Peunaron hanya bisa panen dua kali dalam setahun, kondisi ini semakin terpuruk apabila musim kemarau telah tiba.

Selanjutnya, Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena cukup banyak persoalan yang belum terselesaikan baik itu permasalahan infrastruktur, air bersih dan akses internet. Lantas bagaimana Dampak Kontestasi Politik Pada Pilkada Tahun 2017 Terhadap Pembangunan di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah peneliti adalah:

1. Bagaimana Dampak Pilkada Tahun 2017 Terhadap Pembangunan di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Pembangunan di Kecamatan Peunaron Tidak optimal?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka fokus kajian penelitian ini adalah:

1. Adapun Dampak Pilkada Tahun 2017 Terhadap Pembangunan di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Terutama pada pembangunan infrastruktur, akses internet dan akses air bersih.
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Pembangunan di Kecamatan Peunaron Tidak Optimal.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian penelitian penulis maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan Bagaimana Dampak Pilkada Tahun 2017 Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui Mengapa Pembangunan Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Tidak Optimal.

## 1.5 **Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat teoritis

Berdasarkan fokus kajian penelitian penulis maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Supaya memberikan masukan dan sumber informasi bagi disiplin ilmu politik, terutama pada bidang Politik Pembangunan di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.
2. Supaya memberikan masukan dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Dampak Pilkada Tahun 2017 Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara

lain:

1. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan elit politik mengenai Politik Pembangunan.
2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pembaca, pengamat politik, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini mengenai Politik Pembangunan.